

**SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI 2025)**



Disusun Oleh :

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan di Pengadilan Negeri Tapaktuan Triwulan II Tahun 2025 ini.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam rangka Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan dan membaangun ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Triwulan II Tahun 2025 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



Daniel Saputra, S.H.,M.H.
Nip. 198008272006041001

Tapaktuan, 2 Juli 2025

Ketua Tim,



Ghina Miralda, S.H.
Nip. 199709202022032016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Landasan Hukum.....	4
D. Rencana Kerja.....	5
BAB II METODOLOGI.....	7
A. Metodologi Penelitian.....	7
B. Populasi dan Sampel.....	7
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa.....	7
D. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	7
E. Teknik Analisa data.....	8
F. Tahapan Pelaksanaan.....	8
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	10
A. Profil Responden.....	10
B. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	11
C. Indeks Persepsi Korupsi satuan kerja pada pengadilan.....	12
D. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan satuan kerja pada pengadilan.....	12
BAB IVPENUTUP.....	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Rekomendasi.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. RENCANA KERJA

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

– Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

– Penyiapan Bahan

- 1) Kuesioner.
- 2) Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- 3) Kelengkapan peralatan.

– Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- 1) Jumlah Responden.
- 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- 3) Penyusunan Jadwal
- 4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

4. Rencana Kerja pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 8 April 2025 s/d 30 Juni 2025 dengan menetapkan target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 3,5 (tiga koma lima).

5. Target Capaian Pekerjaan

Target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam survey Indeks Persepsi Korupsi adalah 87,5% (delapan tujuh koma lima persen).

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Umur Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	30	37,04%
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	28	34,57%
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	15	18,52%
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	8	9,88%
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	0	0,00%
		81	

Mayoritas responden ini berumur 18 tahun sampai dengan 28 tahun dengan jumlah 30 orang (37,04%) dari total 81 orang.

2. Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	65	80,25%
2	Perempuan	16	19,75%
		81	100%

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 65 orang (80,25%) dari total 81 orang.

3. Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	SD	0	0%
2	SLTP	0	0%
3	SLTA	27	33,33%
4	Diploma	3	3,70%
5	S1	49	60,50%
6	S2	2	2,47%
7	S3	0	0%
8	Tidak / Belum Sekolah	0	0%
		81	100%

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah S1 yang berjumlah 49 orang dari total responden 81 orang (80,44%)

4. Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	PNS	10	12,35%
2.	TNI	1	1,23%
3.	POLRI	2	2,47%
4.	SWASTA	24	29,63%
5.	WIRUSAHA	2	2,47%
6.	TENAGA KONTRAK	4	4,94%
7.	LAINNYA	38	46,91%
		81	100%

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Lainnya yang berjumlah 38 orang (46,91%) dari total responden 81 orang

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan sebesar yang berada pada kategori

Analisis selanjutnya disajikan secara ringkas disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan dalam tabel berikut ini:

INDEKS PERSEPSI KORUPSI				
Indikator	Unsur Penilaian	Jumlah	NRR Per RL	NRR Tertimbang
U1	Manipulasi peraturan	318	3,926	0,393
U2	Penyalahgunaan Jabatan	318	3,926	0,393
U3	Menjual Pengaruh	318	3,926	0,393
U4	Transparansi Biaya	318	3,926	0,393
U5	Transaksi Rahasia	318	3,926	0,393
U6	Biaya Tambahan	318	3,926	0,393
U7	Hadiah	318	3,926	0,393
U8	Transparansi Pembayaran	318	3,926	0,393
U9	Percaloan	318	3,926	0,393
U10	Perbuatan Curang	318	3,926	0,393
IPK Unit Pelayanan		3,93		

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Nilai persepsi	Nilai interval	Nilai interval konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

C. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan
1	Pelayanan baik dan memuaskan
2	Pelayanan telah sesuai dengan prosedur
3	Pelayanan telah dilakukan dengan sepenuh hati

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Tapaktuan sebesar 3,93 atau masuk pada Kinerja : A (**Bersih dari korupsi**) dengan jumlah responden sebesar 81. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Manipulasi Peraturan di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
2. Mayoritas responden menyatakan Penyalahgunaan Jabatan di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
3. Mayoritas responden menyatakan Menjual Pengaruh di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
4. Mayoritas responden menyatakan Transparansi Biaya di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
5. Mayoritas responden menyatakan Transaksi Rahasia di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
6. Mayoritas responden menyatakan Biaya Tambahan di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
7. Mayoritas responden menyatakan Hadiah di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
8. Mayoritas responden menyatakan Transparansi pembayaran di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
9. Mayoritas responden menyatakan Percaloan di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**
10. Mayoritas responden menyatakan Perbuatan Curang di Pengadilan Negeri Tapaktuan **TIDAK ADA**

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 98,15% atau masuk pada persepsi A (**Bersih dari korupsi**). Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Prosedur jenis Pelayanan, Penyalahgunaan Jabatan dan adanya Percaloan dan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Drs.Ridwan, M.B.A. Dasar – dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung. 2008

Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977

Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 3. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi



SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIS

Survei Persepsi Anti Korupsi

Harap isikan data yang benar dan jujur dalam mengisi kuesioner ini. Hasil kuesioner yang diisi akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Data Responden

Nama	NISA NURHADIYAH		
Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Alamat & lokasi
Wanita	20	PAJARAN	RT. 001/001
Alamat IP	192.168.1.1		
Device	Ponsel		
Provinsi	P. Kalimantan		
Kabupaten	Kab. Paser		
Kecamatan	Kec. Paser		
Kelurahan	Kel. Paser		

Survei Persepsi Anti Korupsi

Submit

APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIS

Survei Persepsi Anti Korupsi

Harap isikan data yang benar dan jujur dalam mengisi kuesioner ini. Hasil kuesioner yang diisi akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Data Responden

Nama	NISA NURHADIYAH		
Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Alamat & lokasi
Wanita	20	PAJARAN	RT. 001/001
Alamat IP	192.168.1.1		
Device	Ponsel		
Provinsi	P. Kalimantan		
Kabupaten	Kab. Paser		
Kecamatan	Kec. Paser		
Kelurahan	Kel. Paser		

Survei Persepsi Anti Korupsi

Submit

Soal Pilihan Ganda

Pada pertemuan kali ini, setiap peserta akan diberikan 10 pertanyaan pilihan ganda yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.

1. **Tidak Benar**
Gagal

2. **Benar**
Benar

3. **Benar**
Benar

4. **Benar**
Benar

1. Apakah program ini program di Pengadilan yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak Benar
- Benar
- Benar
- Tidak Benar

2. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Pengadilan yang berkaitan dengan administrasi pengadilan
- Pengadilan yang berkaitan dengan administrasi pengadilan
- Pengadilan yang berkaitan dengan administrasi pengadilan
- Pengadilan yang berkaitan dengan administrasi pengadilan

3. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

4. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

5. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

6. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

7. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

8. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

9. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

10. Apakah dalam lingkungan sistem pengadilan, secara umum dan khusus ada pembagian jabatan dan tugas yang berkaitan dengan administrasi pengadilan?

- Tidak
- Benar
- Benar
- Tidak

Formulir Pendaftaran Pengaduan

Pada formulir pendaftaran ini, Anda dapat melaporkan keluhan atau masalah yang dialami dalam menggunakan layanan publik.

☒ **Daftar Pengaduan**
Klik tombol ini untuk memulai.

☐ **Layanan**
Klik tombol ini untuk melihat layanan yang tersedia.

☐ **Profil Pengguna**
Klik tombol ini untuk melihat profil pengguna.

☐ **Daftar Pengaduan**
Klik tombol ini untuk melihat daftar pengaduan.

Anda dapat memilih jenis keluhan yang dialami dalam menggunakan layanan publik.

Tentukan jenis keluhan yang dialami dalam menggunakan layanan publik. Klik tombol "Daftar Pengaduan" untuk melihat daftar pengaduan yang tersedia. Anda dapat memilih jenis keluhan yang dialami dalam menggunakan layanan publik. Klik tombol "Daftar Pengaduan" untuk melihat daftar pengaduan yang tersedia.

Daftar Pengaduan

Daftar Pengaduan

Daftar Pengaduan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Jl. Srenged 80000 No. 11 KAL. 40161 SELATAN
Nangroe Aceh Darussalam
<http://www.pnktaktuan.go.id>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,93 / 98,15%

Jumlah	81 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKSANA : 25 PEREMPUAN : 56
Pendidikan	Tinggi / Belum Selesai : 5 Diploma 21 D SD : 9 SLTP : 5 SLTP : 27 Diploma 1 : 1 SMP : 10 TN : 5 PDRH : 2 Lainnya : 55
Pekerjaan	Diploma 3 : 2 ST : 43 SD : 2 SD : 3 SWASTA : 24 KORPRIKOL : 2 TENAGA KONTAK : 2

WILSON'S & DILLIARD'S



Q Premier Publishing

Index Total	UAS Unit Response	Dasar Email Response	Dasar Unit Response	Dasar Layanan	Waktu Per Email						
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
Waktu Per RL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,240
Waktu Tambahan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Waktu Unit Pelayanan											0,00

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Septia Windya Sari R-098590-IPAK-4081D32D76 No. HP 082370671952	ACEH	28 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2025
2	Samsul Rizal R-098590-IPAK-094AA1C4E0 No. HP 082162490459	ACEH	38 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juni 2025
3	Junda R-098590-IPAK-805C43A68D No. HP 081260661241	ACEH	32 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Juni 2025
4	Arlis R-098590-IPAK-F911CFF748 No. HP 081377345059	ACEH	53 Tahun Laki-laki	SMUNIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Juni 2025
5	Asmrandani R-098590-IPAK-89FC17771C No. HP 081324629325	ACEH	53 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
6	Thias R-098590-IPAK-FCB1CE5144 No. HP 085275778999	ACEH	35 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
7	Thias R-098590-IPAK-93D538C088 No. HP 065275778999	ACEH	35 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
8	Mustawir R-098590-IPAK-6EE1B3E62A No. HP 082112025520	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
9	Isan Maulana R-098590-IPAK-F81600FB02 No. HP 085379264459	ACEH	30 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
10	Muhammad Fatah Akbar R-098590-IPAK-CEBA53C6DE No. HP 082367168269	ACEH	19 Tahun Laki-laki	Diploma 1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
11	Nuzakir R-098590-IPAK-E46BA00F28 No. HP 061230264438	ACEH	45 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
12	Murdani SH R-098590-IPAK-6A859F3FD2 No. HP 090277996220	ACEH	34 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
13	M Ikhsan R-098590-IPAK-C8F5C9F3A8 No. HP 082245132309	ACEH	39 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
14	Jli Afwedi R-098590-IPAK-A024DE175A No. HP 085277286733	ACEH	35 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Juni 2025
15	Amzal R-098590-IPAK-C20A97F98D No. HP 082361767298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
16	Mustawir R-098590-IPAK-A95C006953 No. HP 061263530200	ACEH	29 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Juni 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
17	Yayu Supardi R-098590-IPAK-32B933C03D No. HP 081263530200	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juni 2025
18	Mustawir R-098590-IPAK-D9928135A0 No. HP 082112025620	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Juni 2025
19	Supardi R-098590-IPAK-064E684FC3 No. HP 082272221935	ACEH	38 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Juni 2025
20	Mukhlis Priadi R-098590-IPAK-1354BDE8FB No. HP 085359900982	ACEH	53 Tahun Laki-laki	S2SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Juni 2025
21	Andanmayah R-098590-IPAK-3F76564C8C No. HP 081377308180	ACEH	60 Tahun Laki-laki	S2PNB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Juni 2025
22	Rezha Lahfatul R-098590-IPAK-83AB1FF0DF No. HP 082273203338	ACEH	23 Tahun Laki-laki	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Juni 2025
23	Zuhri R-098590-IPAK-168EDE988B No. HP 082273410723	ACEH	45 Tahun Laki-laki	Diploma 3SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Juni 2025
24	Yayu Supardi R-098590-IPAK-98D881A407 No. HP 081263530200	ACEH	25 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Juni 2025
25	Aidi Firdaus R-098590-IPAK-348D7B736A No. HP 082246871006	ACEH	40 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Juni 2025
26	Musewir R-098590-IPAK-10875828C9 No. HP 082112025520	ACEH	23 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Juni 2025
27	Ridwan Telaumbanua R-098590-IPAK-47DD480D98 No. HP 082285307447	ACEH	57 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Juni 2025
28	Ahizal R-098590-IPAK-9838EA8917 No. HP 082361787296	ACEH	26 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Juni 2025
29	Rizyan Harna R-098590-IPAK-7AD6411998 No. HP 082165513643	ACEH	30 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Mei 2025
30	Nasrul Aulia R-098590-IPAK-F19CB2752D No. HP 082213058419	ACEH	29 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Mei 2025
31	Yayu Supardi R-098590-IPAK-687A0A8F7E No. HP 081263530200	ACEH	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025
32	Rhadio Sarta Stalahi R-098590-IPAK-8A7D3D1FB9 No. HP 082361787296	ACEH	28 Tahun Laki-laki	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
33	Afrizal R-098590-IPAK-20719C444B No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025
34	Afrizal R-098590-IPAK-D4A7CF3E13 No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025
35	Nasruddin R-098590-IPAK-DCF36967C7 No. HP 081360763138	ACEH	35 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025
36	Mursaeli R-098590-IPAK-A832E57429 No. HP 085277986220	ACEH	35 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025
37	Afrizal R-098590-IPAK-23C157AA4B No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Mei 2025
38	Nasruddin R-098590-IPAK-BA47F0F057 No. HP 081360763138	ACEH	35 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Mei 2025
39	Faikal Razi R-098590-IPAK-11874E5402 No. HP 082179416036	ACEH	30 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2025
40	Saemah Fadhil R-098590-IPAK-40860A89AD No. HP 081263530200	ACEH	45 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2025
41	Afrizal R-098590-IPAK-93E8EC530C No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2025
42	Murtani SH R-098590-IPAK-0765734A78 No. HP 085277986220	ACEH	34 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2025
43	Deviana R-098590-IPAK-55998D56F8 No. HP 081269078985	ACEH	41 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Mei 2025
44	Munir R-098590-IPAK-773D694816 No. HP 085334879785	ACEH	63 Tahun Laki-laki	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Mei 2025
45	Amwar R-098590-IPAK-48C8E522A3 No. HP 082136312627	ACEH	28 Tahun Laki-laki	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Mei 2025
46	Rayyan Haris R-098590-IPAK-E518A7CAC9 No. HP 082165613843	ACEH	30 Tahun Laki-laki	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Mei 2025
47	Nila Yudi R-098590-IPAK-1F92141069 No. HP 062260758691	ACEH	35 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Mei 2025
48	Murdani R-098590-IPAK-6120D0703B No. HP 085277986220	ACEH	35 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Mei 2025
49	Afrizal R-098590-IPAK-25EEA8A46C No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Mei 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
50	Rajyan R-098590-IPAK-37171E0281 No. HP 085360000131	ACEH	40 Tahun Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Mei 2025
51	Rajuddin R-098590-IPAK-67C0D4D834 No. HP 081260186272	ACEH	30 Tahun Laki-laki	SITENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
52	Rajuddin R-098590-IPAK-16C31C7CE7 No. HP 081260186272	ACEH	30 Tahun Laki-laki	SITENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
53	Indawati R-098590-IPAK-43119C715D No. HP 081360018122	ACEH	45 Tahun Perempuan	SIPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
54	Abdul R-098590-IPAK-3701038645 No. HP 082361787288	ACEH	28 Tahun Laki-laki	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Mei 2025
55	Ahmad Khairul Anwar R-098590-IPAK-4C1C234CCC No. HP 082136312627	ACEH	27 Tahun Laki-laki	SIPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Mei 2025
56	Rhella Banta Sitohji R-098590-IPAK-57FC833A11 No. HP 081388889786	ACEH	32 Tahun Laki-laki	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Mei 2025
57	Sekilindi, Skm R-098590-IPAK-578DE86C14 No. HP 085143178977	ACEH	48 Tahun Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2025
58	Putri R-098590-IPAK-0D40111F41 No. HP 065164518339	ACEH	23 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30 April 2025
59	Yasminur R-098590-IPAK-A8EFB4D8EF No. HP 082384602937	ACEH	34 Tahun Perempuan	SILAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2025
60	Juraida R-098590-IPAK-E0F46446C5 No. HP 081262408824	ACEH	44 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 April 2025
61	Husni Alwan R-098590-IPAK-CFC0D524E8 No. HP 082268778034	ACEH	42 Tahun Laki-laki	SMUTNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 April 2025
62	Rajha R-098590-IPAK-04C37B42C4 No. HP 081260188272	ACEH	27 Tahun Laki-laki	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 April 2025
63	Rajyan Hani R-098590-IPAK-DEE20E7062 No. HP 082169188272	ACEH	30 Tahun Laki-laki	SISWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 April 2025
64	Nurhayati R-098590-IPAK-0D56D648C5 No. HP 065381987481	ACEH	48 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 April 2025
65	M Yakub R-098590-IPAK-7558C148B2 No. HP 065204654472	ACEH	55 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 April 2025
66	Puspa Desi R-098590-IPAK-C642B1233E No. HP 085213216630	ACEH	45 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 April 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
67	M Yakin R-098590-IPAK-1A5A9BCA38 No. HP 085260455472	ACEH	53 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 April 2025
68	Puspa Dewi R-098590-IPAK-AC88C577D2 No. HP 085213518630	ACEH	45 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 April 2025
69	Syafi R-098590-IPAK-B7F44C77F3 No. HP 081280188272	ACEH	27 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 April 2025
70	Rayyan Hais R-098590-IPAK-78883937D No. HP 082155513943	ACEH	30 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
71	Eli Kusma R-098590-IPAK-1F76782D70 No. HP 085260435517	ACEH	48 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 April 2025
72	Salmah R-098590-IPAK-09C8CF2F89 No. HP 082175418936	ACEH	40 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
73	Fiskal Radi R-098590-IPAK-65EE0A3473 No. HP 082175418936	ACEH	33 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
74	Fiskal Radi R-098590-IPAK-00238F56E5 No. HP 082175418936	ACEH	33 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
75	Afrizal, S.H. R-098590-IPAK-F28427221E No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 April 2025
76	Fera Nurhidari R-098590-IPAK-2D003D684E No. HP 082181593646	ACEH	23 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 April 2025
77	Fera Nurhidari R-098590-IPAK-9F915E9EAE No. HP 082181593646	ACEH	23 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 April 2025
78	Murdani, S.H. R-098590-IPAK-ABAF310C9D No. HP 085277586220	ACEH	34 Tahun Laki-laki	Diploma 3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 April 2025
79	Afrizal, S.H. R-098590-IPAK-FA8951FAC1 No. HP 082361787298	ACEH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 April 2025
80	Elda Mahdi R-098590-IPAK-EDC5635E64 No. HP 085233755378	ACEH	24 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 April 2025
81	Elda Mahdi R-098590-IPAK-DC58433D68 No. HP 085233755378	ACEH	24 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 April 2025

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



**MONITORING DAN EVALUASI
ATAS HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**MONITORING DAN EVALUASI
ATAS HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

A. Latar Belakang.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

- 1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditemukan bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) responden diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 4,00 atau masuk pada kinerja A (Bersih dari Korupsi).

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

Indikator	Indeks
Manipulasi Peraturan	3,926
Penyalahgunaan Jabatan	3,926
Menjual Pengaruh	3,926
Transparansi Biaya	3,926
Transaksi Rahasia	3,926
Biaya Tambahan	3,926
Hadiah	3,926
Transparansi Pembayaran	3,926
Percaloan	3,926
Perbuatan Curang	3,926

Akan tetapi dari 10 (sepuluh) indikator pada tabel diatas, terdapat 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yang perlu ditindak lanjuti untuk perbaikan layanan dikemudian hari. Adapun 3 (tiga) indikator yang menjadi temuan untuk ditindak lanjuti tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Prosedur jenis Pelayanan (318);	Prosedur jenis Pelayanan nilainya cukup rendah karena kurangnya pemahaman masyarakat akan syarat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan. Menindak lanjuti indikator tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat brosur baik berupa brosur online maupun flyer untuk memperjelas syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan dari Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan memperkuat kompetensi Petugas Pelayanan Satu Pintu (PTSP);	Sudah ditindaklanjuti
2.	Penyalahgunaan Jabatan (318);	Terkait Indikator Penyalahgunaan Jabatan, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memerintahkan Jajarannya agar setiap pelayanan kepada masyarakat dilakukan di meja PTSP agar setiap transaksi dilaksanakan secara terbuka, sehingga tidak ada lagi transaksi yang dilakukan secara rahasia dan adanya penyalahgunaan jabatan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.	Sudah ditindaklanjuti
3.	Percaloan (318);	Percaloan erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam rangka mencari keadilan, oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mengeluarkan Surat keputusan yang mewajibkan setiap kegiatan pelayanan diberikan melalui jalur satu pintu, yaitu	Sudah ditindaklanjuti

		Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya percaloan dan tetap kegiatan dan pelayanan diberikan secara terbuka dan prima Terkait hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan telah melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan pembinaan terkait larangan penerimaan hadiah pada saat rapat bulanan, membuat banner yang dipajang pada website maupun kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan. Selain itu Pengadilan Negeri Tapaktuan juga telah membuka sarana untuk memfasilitasi laporan masyarakat terkait gratifikasi baik melalui meja pengaduan PTSP, aplikasi Lapor, aplikasi Siwas, maupun email dan fax Pengadilan Negeri Tapaktuan.	
--	--	--	--

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diharapkan agar Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan, hendaknya meningkatkan integritas dalam pelayanannya dan menghindari hal yang khususnya pada ruang lingkup Prosedur jenis Pelayanan, Penyalahgunaan Jabatan dan adanya Percaloan.

Dan diharapkan pula pada para pimpinan untuk selalu menekankan tentang pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan selalu melakukan pengawasan dan pembimbingan pada jajarannya.

Demikian hasil Monitoring Dan Evaluasi Atas Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri Tapaktuan Triwulan II Tahun 2025 agar dijadikan acuan dalam kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan ke depan.

Tapaktuan, 2 Juli 2025
Pengadilan Negeri Tapaktuan
Panitera Muda Hukum


Raudhatunnur, S.H.M.H

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK)
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026 (APRIL s/d JUNI 2025)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK)
PERIODE TRIWULAN II 2025 (APRIL s/d JUNI 2025)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

I. Responden

Sebanyak 81 (delapan puluh satu) responden terdiri dari masyarakat pencari keadilan dan instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan (Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Polres Aceh Selatan, Rutan Kelas II Tapaktuan, Advokat, serta masyarakat pencari keadilan)

II. Ruang Lingkup Survey

Berdasarkan Laporan Hasil survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II tahun 2025 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 4 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No	Unsur Pertanyaan
Q 1	Manipulasi Peraturan
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan
Q 3	Menjual Pengaruh
Q 4	Transparansi Biaya
Q 5	Transaksi Rahasia
Q 6	Biaya Tambahan
Q 7	Hadiah
Q 8	Transparansi Pembayaran
Q 9	Percaloan
Q 10	Perbuatan Curang

1. Cara Menjawab

Terhadap 10 Ruang Lingkup Survey tersebut responden diminta untuk memberikan jawaban dengan memilih salah satu dari 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia yaitu ;

- i. Ruang Manipulasi Peraturan
 - Jawaban a(selalu)
 - Jawaban b(sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- ii. Ruang Penyalahgunaan Jabatan
 - Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- iii. Ruang Menjual Pengaruh
 - Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b(sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- iv. Ruang Transparansi Biaya
 - Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- v. Ruang Transaksi Rahasia
 - Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- vi. Ruang Biaya Tambahan
 - Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- vii. Ruang Hadiah
 - Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)

- Jawaban d (tidak ada)
- viii. Ruang Tranparansi Pembayaran
- Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- ix. Ruang Percaloan
- Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b (sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)
- x. Ruang perbuatan Curang
- Jawaban a (selalu)
 - Jawaban b(sering)
 - Jawaban c (jarang-jarang)
 - Jawaban d (tidak ada)

III. Hasil Survey

Survei yang dilakukan terhadap 81 (delapan puluh satu) responden hasilnya sebagai berikut:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata- rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,926
Q 2	Penyalah gunaan Jabatan	3,926
Q 3	Menjual Pengaruh	3,926
Q 4	Transparansi Biaya	3,926
Q 5	Transaksi Rahasia	3,926
Q 6	Biaya Tambahan	3,926
Q 7	Hadiaheer	3,926
Q 8	Transparansi Pembayaran	3,926
Q 9	Percaloan	3,926
Q 10	Perbuatan Curang	3,926

IV. Tindak Lanjut yang dilakukan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Akan tetapi dari 10 (sepuluh) indikator pada tabel diatas, terdapat 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yang perlu ditindak lanjuti untuk perbaikan layanan dikemudian hari. Adapun 3 (tiga) indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Prosedur jenis Pelayanan (318);**
- 2. Penyalah gunaan Jabatan (318);**
- 3. Percaloan (318);**

Menindak lanjuti hasil survei tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sebagai pemberilayanan telah mengambil langkah-langkah perbaikan dengan cara sebagai berikut :

1. Prosedur jenis Pelayanan

Prosedur jenis Pelayanan nilainya cukup rendah karena kurangnya pemahaman masyarakat akan syarat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan, Menindak lanjuti indikator tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat brosur baik berupa brosur online maupun flyer untuk memperjelas syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan dari Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan memperkuat kompetensi Petugas Pelayanan Satu Pintu (PTSP);

2. Penyalah gunaan Jabatan

Terkait Indikator Penyalah gunaan Jabatan, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memerintahkan Jajarannya agar setiap pelayanan kepada masyarakat dilakukan di meja PTSP agar setiap transaksi dilaksanakan secara terbuka, sehingga tidak ada lagi transaksi yang dilakukan secara rahasia dan adanya penyalahgunaan jabatan yang terjadi dilingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan .

3. Percaloan

Percaloan erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam rangka mencari keadilan, oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mengeluarkan Surat keputusan yang mewajibkan setiap kegiatan pelayanan diberikan melalui jalur satu pintu, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya percaloan dan tetap kegiatan dan pelayanan diberikan secara terbuka dan prima .

Terkait hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan telah melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan pembinaan terkait larangan penerimaan hadiah pada saat

rapat bulanan, membuat banner yang dipajang pada website maupun kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan. Selain itu Pengadilan Negeri Tapaktuan juga telah membuka sarana untuk memfasilitasi laporan masyarakat terkait gratifikasi baik melalui meja pengaduan PTSP, aplikasi Lapor, aplikasi Siwas, maupun email dan fax Pengadilan Negeri Tapaktuan.

paktuan, 2 Juli 2025

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



Daniel Saputra, S.H.,M.H.
Nip. 198008272006041001

Ketua Tim,



Ghina Miralda, S.H.
Nip. 199709202022032016